

# STATISTIK KETENAGAKERJAAN KABUPATEN WAKATOBI 2017



# STATISTIK KETENAGAKERJAAN KABUPATEN WAKATOBI 2017



# Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Wakatobi 2017

Nomor ISBN : -  
Nomor Publikasi : 74070.1805  
Katalog BPS : 2301004.7407

Ukuran Buku : 17.6 x 25 cm  
Jumlah Halaman : xii + 38 halaman

Naskah  
**Seksi Statistik Sosial**  
**BPS Kabupaten Wakatobi**

Penyunting  
**BPS Kabupaten Wakatobi**

Gambar Kulit  
**BPS Kabupaten Wakatobi**

Diterbitkan oleh  
**© Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi**

Dicetak oleh

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

# Kata Pengantar

Publikasi Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 merupakan publikasi pertama terkait statistik ketenagakerjaan yang rencananya akan diterbitkan oleh BPS Kabupaten Wakatobi secara tahunan di periode mendatang. Publikasi ini memuat berbagai informasi umum terkait situasi ketenagakerjaan, yaitu menyangkut masalah angkatan kerja, partisipasi angkatan kerja, tingkat kesempatan kerja, tingkat pengangguran, penduduk yang bekerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan di tingkat wilayah Kabupaten Wakatobi. Data-data pokok yang digunakan sebagian besar bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diolah BPS Kabupaten Wakatobi serta data-data lain yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan penunjang analisis.

Kami menyadari meskipun telah diupayakan secara maksimal, akan tetapi publikasi ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wangi-wangi, Agustus 2018  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Wakatobi



Ade Ida Mane, S.ST, M.Si



# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Grafik .....	ix
Daftar Gambar .....	xi
<b>Ringkasan .....</b>	<b>1</b>
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Ruang Lingkup .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika .....	4
1.5 Sumber Data .....	4
<b>Konsep dan Definisi .....</b>	<b>5</b>
<b>Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 .....</b>	<b>13</b>
3.1 Penduduk Usia Kerja .....	13
3.2 Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja .....	15
3.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) .....	17
3.4 Penduduk Bekerja .....	19
3.5 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) .....	26
3.6 Pengangguran .....	27
<b>Lampiran .....</b>	<b>31</b>



# Daftar Tabel

No	Judul Tabel	Hal
1	Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2017	14
2	Distribusi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi, 2017	16
3	Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017	17
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017	18
5	Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi, 2017	19
6	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017	22
7	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017	23
8	Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017	24
9	Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017	25
10	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017	27
11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017	28
12	Pengangguran Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017	28
13	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin, 2017 (Jiwa)	34

No	Judul Tabel	Hal
14	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2017 (Jiwa)	35
15	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2017 (Jiwa)	36
16	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin, 2017 (Jiwa)	37
17	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2017 (Jiwa)	38

<https://wakatobikab.bps.go.id>

# Daftar Grafik

No	Judul Grafik	Hal
1	Piramida Penduduk Kabupaten Wakatobi, 2017	15
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017	18
3	Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017	20
4	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017	21
5	Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Jam Kerja Seminggu di Kabupaten Wakatobi, 2017	26
6	Jumlah Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017	29



# Daftar Gambar

No	Judul Gambar	Hal
1	Diagram Ketenagakerjaan	33

<https://wakatobikab.bps.go.id>



# Ringkasan

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Wakatobi tahun 2017 sekitar 64,88 persen, dimana TPAK laki-laki mencapai 78,31 persen dan TPAK perempuan sebesar 53,09 persen.
2. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 mencapai 97,57 persen dengan TKK penduduk laki-laki sekitar 96,36 persen dan TKK penduduk perempuan sekitar 99,14 persen.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wakatobi tahun 2017 mencapai 2,43 persen dengan TPT penduduk laki-laki sekitar 3,64 persen dan TPT penduduk perempuan sekitar 0,86 persen.
4. Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pengangguran di Wakatobi didominasi oleh mereka yang berkuliah SLTA dan Diploma ke atas. Rinciannya sekitar 41,27 persen penganggur berijazah SLTA dan 25,39 persen berijazah Diploma ke atas.
5. Rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Wakatobi tahun 2017 sekitar 63,30 persen.
6. Ditinjau berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, lebih dari setengah (61,81 persen) penduduk Wakatobi yang bekerja tahun 2017 berijazah SLTP ke bawah. Hanya 15,96 persen yang berpendidikan diploma ke atas.
7. Persentase pekerja dengan jam kerja normal (35 jam ke atas dalam seminggu) sekitar 57,66 persen. Sekitar 39,70 persen adalah para pekerja dengan jam kerja antara 1 – 34 jam, sedangkan sisanya 2,65 persen merupakan angkatan kerja yang sementara tidak bekerja saat pendataan dilaksanakan.
8. Distribusi sektoral penyerapan menunjukkan bahwa 39,92 persen pekerja di Wakatobi memiliki lapangan usaha utama di sektor pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan). Sementara jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan sebesar 23,94 persen. Sebesar 11 persen terserap di sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi, 10,22 persen terserap di sektor konstruksi, dan 14,92 persen di sektor lainnya.
9. Dari persentase sebesar 23,94 yang bekerja di sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan tersebut sejumlah 3.041 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.

10. Persentase penduduk yang bekerja bekerja menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Wakatobi tahun 2017 masih didominasi oleh pekerja dengan status berusaha sendiri (29,26 persen), buruh/karyawan/pegawai (28,84 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (20,35 persen), pekerja keluarga (13,84 persen), pekerja bebas di non pertanian (5,25 persen), dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (2,46 persen).
11. Mayoritas (68,70 persen) pekerja di Kabupaten Wakatobi berstatus sebagai pekerja informal, sisanya 31,30 persen berstatus pekerja formal.

<https://wakatobikab.bps.go.id>

# Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat krusial. Ada beberapa faktor yang secara simultan dan kompleks saling berpengaruh di dalamnya, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Dimensi ekonomi dalam pembangunan ketenagakerjaan menjelaskan kebutuhan hidup dan peranan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan, sedangkan dimensi sosial dari ketenagakerjaan adalah berkaitan dengan harga diri dan martabat manusia untuk berkarya dalam suatu bidang pekerjaan, dari sisi politik isu ketenagakerjaan merupakan komoditi politik untuk mendapatkan kekuasaan dan lemahnya perlindungan hukum ketenagakerjaan sering menjadi gejolak massa. Fokus pembangunan ketenagakerjaan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan berusaha. Dengan demikian penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Di samping menggunakan indikator makro ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan sebagainya, penilaian kemajuan hasil pembangunan tentunya juga harus memperhatikan aspek tenaga kerja karena penduduk secara umum sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pembangunan. Oleh karena itu diperlukan gambaran atau kondisi ketenagakerjaan dalam bentuk data yang terbanding dan tersedia secara kontinyu dari tahun ke tahun. Keterbandingan ini penting karena suatu angka/data tidak berarti apa-apa jika tidak ada angka/data lain sebagai pembandingnya.

Berangkat dari kesadaran pentingnya indikator ketenagakerjaan guna mendapatkan gambaran atau kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Wakatobi, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi menyusun publikasi **“Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Wakatobi 2017”**.

Publikasi ini menampilkan indikator-indikator umum ketenagakerjaan pada tahun 2017. Beberapa istilah ketenagakerjaan yang digunakan juga ditampilkan guna membantu para pengguna data dalam menginterpretasikan dan melakukan analisis atas informasi yang disajikan.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan Statistik Ketenagakerjaan ini adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang berdomisili di wilayah Kabupaten Wakatobi.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Diterbitkannya publikasi ketenagakerjaan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data dasar ketenagakerjaan bagi seluruh pengguna data baik pemerintah maupun swasta.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyajian publikasi ini yaitu:

1. Memberikan gambaran kondisi ketenagakerjaan lebih rinci menurut aspek jenis kelamin, pendidikan, lapangan usaha, dan status pekerjaan.
2. Penyediaan indikator utama di bidang ketenagakerjaan, serta
3. Menjadi informasi awal bagi pihak pemerintah dan swasta dalam menyusun kebijakan dan strategi di bidang ketenagakerjaan.

## **1.4 Sistematika**

Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 dibagi menjadi 4 (empat) bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang, ruang lingkup, maksud dan tujuan, sistematika, serta sumber data. Bagian kedua menguraikan konsep dan definisi yang digunakan. Bagian ketiga merupakan gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Wakatobi tahun 2017. Bagian keempat menyajikan kesimpulan di akhir

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan angka persentase dan untuk menambah ilustrasi atau penekanan angka tertentu juga digunakan grafik. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengguna data dalam membaca data.

## **1.5 Sumber Data**

Sumber data Statistik Ketenagakerjaan 2017 adalah hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017.

# Konsep dan Definisi

Dalam melaksanakan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Badan Pusat Statistik merujuk pada konsep/definisi ketenagakerjaan yang direkomendasikan oleh *International Labour Organization* (ILO) sebagaimana tercantum dalam buku "*Survey of Economically Active Population Employment, Unemployment and Underemployment*", *An ILO Manual on Concept and Methods*, ILO 1992. Berdasarkan konsep tersebut penduduk dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukan. Kelompok tersebut adalah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukuran berdasarkan pada periode rujukan (*time reference*) seperti yang banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan Sakernas (Standar Internasional), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu.

Definisi yang berkaitan dengan penerapan konsep tersebut adalah:

1. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas, sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.
2. **Penduduk yang termasuk angkatan kerja** adalah terdiri dari mereka yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja atau pengangguran.
3. **Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja yang sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.
4. **Bekerja** adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dengan waktu bekerja paling sedikit selama satu jam dalam satu minggu terakhir. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi (sesuai rekomendasi ILO). Tidak termasuk penerima pendapatan/pensiun yang tidak bekerja selama seminggu yang lalu.

Pendekatan angkatan kerja dalam Sakernas memiliki beberapa aturan dasar atau azas yang mendasar seperti:

**Pertama**, azas eksklusivitas, dengan azas ini penduduk usia kerja hanya digolongkan dalam satu kategori. Seseorang dikategorikan bekerja tidak

dimasukkan dalam kategori yang lain seperti sekolah, sekalipun orang tersebut bekerja tetapi juga sekolah.

**Kedua**, asas prioritas, dengan asas ini urutan kategori ditentukan secara pasti yaitu bekerja, mencari pekerjaan, sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya. Misalnya, seorang ibu yang sebagian besar waktunya digunakan untuk mengurus rumah tangga tetapi secara aktual dia juga bekerja walaupun hanya satu jam lamanya, maka ibu tersebut digolongkan sebagai penduduk bekerja. Seorang mahasiswa yang “nyambi” bekerja, juga dikategorikan sebagai bekerja sekalipun sebagian besar waktu yang digunakan untuk kuliah.

**Ketiga**, asas lain yang melekat dalam pendekatan angkatan kerja adalah, bahwa dalam penentuan kategori ketenagakerjaan seseorang didasarkan pada kegiatan sebenarnya dalam suatu rujukan periode waktu tertentu (seminggu terakhir).

Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam mendefinisikan seseorang dikategorikan bekerja:

- **Motivasi ekonomi**, untuk dikatakan bekerja kegiatan seseorang harus memiliki motivasi ekonomis, yaitu memperoleh penghasilan atau keuntungan, sehingga jelas bahwa kegiatan yang bermotivasi selain kegiatan ekonomis, misalnya sekedar hobi tidak dikategorikan bekerja.
- **Membantu**, seseorang yang hanya membantu untuk memperoleh penghasilan misalnya seorang anak yang sekedar membantu ibunya di warung secara relatif tetap, atau seorang isteri yang membantu suami di sawah termasuk kategori bekerja, bukan sekolah atau mengurus rumah tangga.
- **Rujukan waktu**, penentuan kategori ketenagakerjaan didasarkan kegiatan aktual atau sebenarnya selama seminggu yang lalu, bukan “biasanya” yang tidak jelas rujukan waktunya, misal seorang ibu rumah tangga yang biasanya hanya mengurus rumah tangga, tetapi dalam waktu kurun seminggu terakhir dia membantu memasak untuk hajatan tetangganya dengan motivasi ekonomi (mendapatkan upah), maka ibu tersebut dikategorikan sebagai bekerja.

“Bekerja paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu digunakan untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja, tanpa melihat lapangan usaha, jabatan maupun status pekerjaannya.”

5. **Punya pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja** adalah keadaan seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja

karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya. Tidak termasuk mereka yang sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja (konsep ILO “*An ILO Manual on Concept and Methods*”).

Contoh:

- a. Pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/peralatan perusahaan mengalami kerusakan dan sebagainya.
- b. Petani yang mengusahakan lahan pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit, atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah).
- c. Orang-orang yang bekerja atas tanggungan/risikonya sendiri dalam suatu bidang keahlian, yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pesanan dan sebagainya. Misalnya: dalang, tukang cukur, tukang pijat, dan sebagainya.

6. **Pengangguran terbuka** adalah mereka yang terdiri dari:

- a. Mereka yang sedang mencari pekerjaan
- b. Mereka yang sedang mempersiapkan usaha
- c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, karena alasan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan tetapi jika ada penawaran mau bekerja
- d. Mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja
  - **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja pada saat survei dan orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka:
    - Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan
    - Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu yang lalu/seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan. Tetapi sebaliknya mereka yang sedang bekerja atau sedang dibebastugaskan, baik akan dipanggil kembali maupun tidak, dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan tidak dapat disebut sebagai pengangguran terbuka.

- **Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang “baru” yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan usaha yang dimaksud adalah apabila ada “tindakan nyata” seperti telah/sedang mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus izin usaha dan sebagainya.

Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat atau mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha. Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bila dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha mempersiapkan suatu kegiatan usaha.

7. **Pekerja dengan jumlah jam kerja di bawah jam kerja normal** adalah mereka yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam seminggu, terdiri dari:
  - **Setengah pengangguran** adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan/sedang mempersiapkan usaha atau masih bersedia menerima pekerjaan.
  - **Pekerja paruh waktu (*part time worker*)** adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu tetapi tidak mencari pekerjaan/tidak sedang mempersiapkan usaha atau tidak bersedia menerima pekerjaan.
8. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang yang bersekolah untuk mengikuti proses belajar baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (paket A/B/C), mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi selama seminggu sebelum pencacahan. Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah.
9. **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah.
10. **Kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi** adalah kegiatan seseorang selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga, misalnya kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti).
11. **Pendidikan tinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan ijazah.

12. **Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan** adalah jumlah jam kerja yang dilakukan seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu. Bagi pedagang keliling, jumlah jam kerjanya dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali ke rumah.
13. **Lapangan usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja.
14. **Jenis pekerjaan/jabatan** adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang bekerja atau sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada kegiatan Sakernas ini mengikuti KJO (Klasifikasi Jabatan Indonesia) tahun 2009.
15. **Status pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit kegiatan/usaha. Sejak tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori:
  - a. **Berusaha sendiri** adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus
  - b. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar** adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh atau pekerja tidak tetap.
  - c. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar** adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
  - d. **Buruh/karyawan/pegawai** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap tidak digolongkan sebagai buruh, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki satu majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.
  - e. **Pekerja bebas di pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan, baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian

meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan perburuan termasuk juga jasa pertanian.

- f. **Pekerja bebas di non pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha non pertanian dengan menerima upah/imbalan, dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi usaha sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, konstruksi/bangunan, perdagangan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan, jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan.
- g. **Pekerja tak dibayar** adalah seseorang yang membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapatkan upah/gaji.

**Pekerja tak dibayar** meliputi:

- Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti isteri yang membantu suaminya atau anak yang membantu ibu/ayahnya di sawah.
- Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu berjualan di warung.
- Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu membuat tikar pada industri rumah tangga pada tetangganya.

Dalam merencanakan pembangunan yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja, diperlukan suatu perencanaan tenaga kerja (*manpower planning*) yang tepat. Suatu daerah harus bisa memperkirakan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kualitas tenaga kerja dan keperluan sektoral minimal sampai dengan lima tahun mendatang. Kalau disebut tentang kualitas tenaga kerja, hal ini berhubungan dengan apa yang disebut sebagai "*human capital*". Ciri khusus yang dimiliki oleh faktor produksi ini adalah jika sering dipakai mereka tidak akan hilang atau berkurang. Dengan semakin sering faktor produksi ini dipakai bukan kadarnya semakin berkurang tetapi justru sebaliknya dan bahkan nilainya menjadi semakin tinggi pula.

Identifikasi dan kuantifikasi dalam pasar tenaga kerja seperti underutilisasi tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) adalah langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tenaga kerja antara lain:

1. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK),
2. Daya serap tenaga kerja,
3. Produktivitas pekerja, dan
4. Tingkat pengangguran.

Untuk lebih jelasnya beberapa indikator tenaga kerja ini akan dibahas satu persatu.

Indikator-indikator yang digunakan pada statistik ketenagakerjaan ini sebagian besar mengacu kepada *the Key Indicators of Labour Market* (KILM) seperti yang direkomendasikan oleh Organisasi Buruh Sedunia (*International Labour Organization/ILO*). Berikut beberapa indikator yang digunakan dan cara penghitungannya.

#### Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

#### Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

#### Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

#### Kontribusi Sektor dalam Penyerapan Tenaga Kerja

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor } - i}{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}} \times 100\%$$

<https://wakatobikab.bps.go.id>

# Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Wakatobi Tahun 2017

## 3.1 Penduduk Usia Kerja

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi tahun 2017 adalah 98.386 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 45.775 jiwa (47,99 persen) dan penduduk perempuan 49.611 jiwa (52,01 persen). Tabel 1 menyajikan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Wakatobi menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Pada tabel tersebut terlihat bahwa pada kelompok usia muda dan usia produktif penduduk laki-laki cenderung lebih besar jumlahnya dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari rasio jenis kelamin Kabupaten Wakatobi sebesar 92,27 persen yang berarti dari 100 penduduk perempuan terdapat 92 sampai 93 penduduk laki-laki.

Jika dilihat dari distribusi penduduk menurut kelompok umur secara keseluruhan (Grafik 1), maka struktur penduduk Kabupaten Wakatobi didominasi oleh penduduk usia produktif yang artinya Kabupaten Wakatobi memiliki sumber tenaga kerja yang besar, yang diperlukan dalam kegiatan perekonomian. Namun di sisi lain apabila penduduk usia produktif ini tidak dapat terserap di pasar tenaga kerja maka dapat meningkatkan jumlah pengangguran.

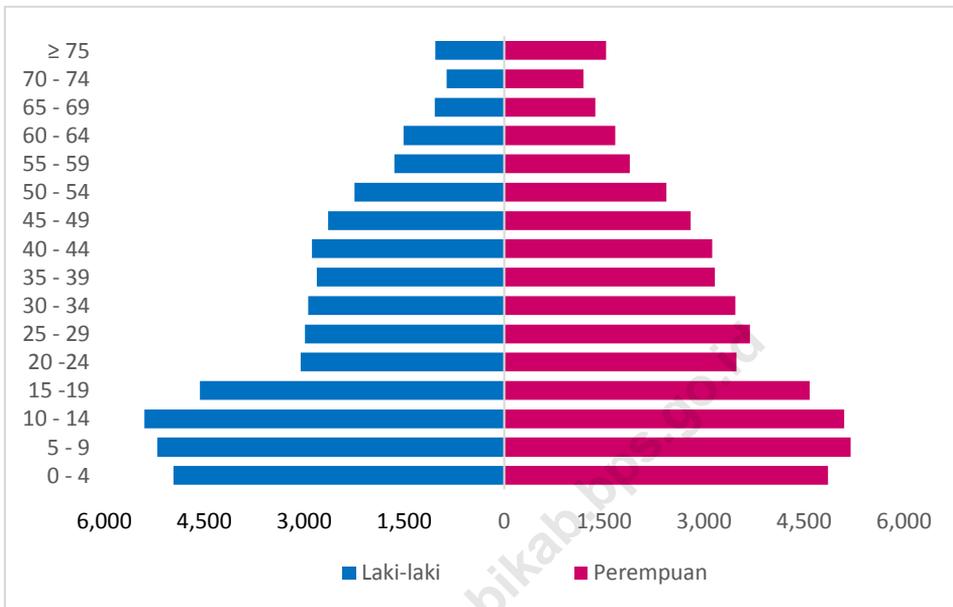
Penduduk usia kerja diasumsikan sebagai penduduk yang telah siap untuk melakukan aktivitas/kegiatan perekonomian. Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk di Kabupaten Wakatobi, sekitar 67,77 persen termasuk kelompok penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas). Dimana berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan memiliki persentase penduduk usia kerja yang hampir sama yakni terdiri dari 65,99 persen penduduk usia kerja laki-laki dan 69,40 persen penduduk usia kerja perempuan.

Tabel 1. Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 - 4	4.961	4.865	9.826	101,97
5 - 9	5.205	5.205	10.410	100,00
10 - 14	5.400	5.110	10.510	105,68
15 -19	4.566	4.592	9.158	99,43
20 -24	3.054	3.490	6.544	87,51
25 - 29	2.989	3.691	6.680	80,98
30 - 34	2.936	3.472	6.408	84,56
35 - 39	2.809	3.165	5.974	88,75
40 - 44	2.881	3.126	6.007	92,16
45 - 49	2.641	2.804	5.445	94,19
50 - 54	2.243	2.437	4.680	92,04
55 - 59	1.649	1.891	3.540	87,20
60 - 64	1.508	1.671	3.179	90,25
65 - 69	1.042	1.369	2.411	76,11
70 - 74	859	1.191	2.050	72,12
≥ 75	1.032	1.532	2.564	67,36
Jumlah	45.775	49.611	95.386	92,27
2016	45.740	49.469	95.209	92,46
2015	45.612	49.373	94.985	92,38

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Wakatobi 2010 – 2035

Grafik 1. Piramida Penduduk Kabupaten Wakatobi, 2017



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Wakatobi 2010 – 2035, diolah

### 3.2 Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja dibedakan menjadi penduduk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Pengelompokan ini berdasarkan jenis kegiatan utama selama seminggu yang lalu. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi dan ingin/bersedia terlibat dalam kegiatan ekonomi secara aktif. Penduduk yang termasuk dalam golongan ini adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran, sedangkan penduduk bukan angkatan kerja adalah mereka dengan kegiatan utama selama seminggu yang lalu adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (seperti pensiunan, penerima pendapatan/transfer, jompo atau alasan lainnya).

Seperti telah dijelaskan pada Bab II, BPS mengelompokkan seseorang dalam ketenagakerjaan berdasarkan kegiatan utama selama seminggu yang lalu. Untuk menghindari terjadinya kategori ganda pada seseorang digunakan **azas eksklusivitas**. Dengan azas tersebut maka seseorang hanya digolongkan dalam satu kategori saja. Manfaat lain dengan azas tersebut adalah dapat dilakukan keterbandingan data ketenagakerjaan antar periode (*apple to apple*). Azas eksklusivitas meletakkan prioritas utama keterlibatan seseorang dalam kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, seseorang yang sedang kuliah sambil bekerja hanya digolongkan dalam satu kategori yaitu bekerja.

Tabel 2. Distribusi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi, 2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
15 - 29	57,14	36,08	46,18
30 - 44	95,15	65,20	79,14
45 - 59	96,66	72,66	84,06
60+	65,04	37,60	49,40
Wakatobi	78,31	53,09	64,88

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

Berdasarkan hasil pendataan Sakernas Agustus 2017, dari total penduduk usia kerja yang ada, sekitar 64,88 persen merupakan angkatan kerja. Sementara 35,12 persen sisanya bukan angkatan kerja. Jika diamati distribusi angkatan kerja menurut kelompok umur dan jenis kelamin (Tabel 2), maka terlihat pada seluruh kelompok umur persentase angkatan kerja penduduk perempuan lebih kecil daripada laki-laki. Hal ini diantaranya disebabkan oleh faktor budaya dan ekonomi yang menempatkan penduduk laki-laki sebagai kepala keluarga atau anggota rumah tangga yang wajib mencari nafkah sehingga penduduk laki-laki lebih banyak sebagai angkatan kerja. Keadaan ini wajar terjadi seiring dengan budaya di masyarakat yang menjadikan laki-laki sebagai penopang nafkah keluarga yang utama. Pembagian tanggung jawab ini menjadikan perempuan sebagai istri lebih fokus untuk mengurus rumah tangga dibandingkan bekerja.

Selain itu, dapat terlihat bahwa angkatan kerja di Kabupaten Wakatobi menunjukkan persentase yang rendah pada usia muda kemudian meningkat pada usia dewasa dan menurun pada usia yang lebih tua. Hal tersebut berkaitan erat dengan pendidikan bagi usia sekolah atau usia muda dan usia pensiun bagi yang sudah tua sehingga mereka keluar dari angkatan kerja.

Tabel 3. Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017

Jenis Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Wakatobi
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Angkatan Kerja</b>	78,31	53,09	64,88
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	21,69	46,91	35,12
• Sekolah	9,41	10,23	9,85
• Mengurus Rumah Tangga	9,64	34,65	22,95
• Lainnya	2,65	2,03	2,32
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

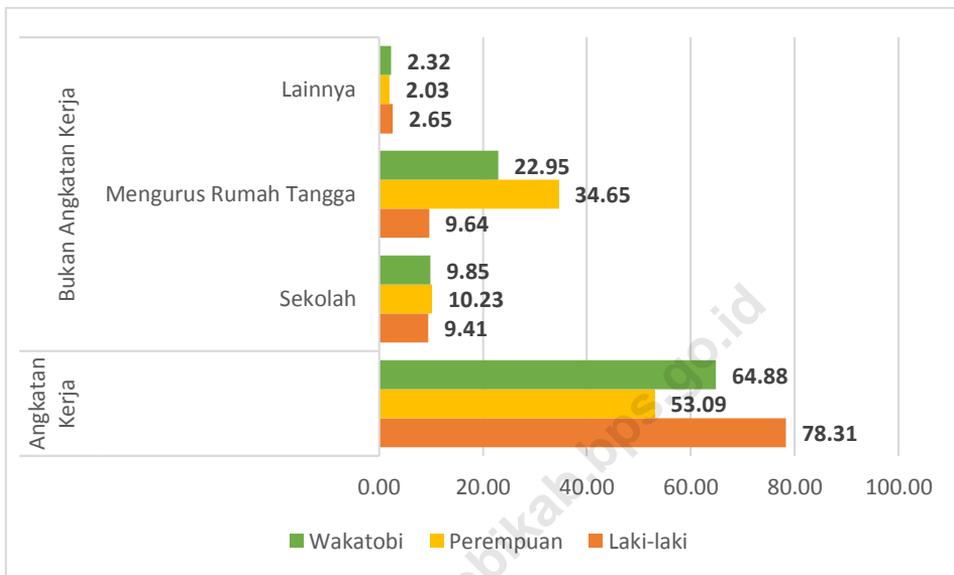
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

Penduduk usia kerja yang masuk bukan angkatan kerja dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu sebesar 46,91 persen untuk perempuan dan 21,69 persen untuk laki-laki. Keadaan ini disebabkan karena perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga dibandingkan dengan laki-laki.

### 3.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Ukuran yang menunjukkan seberapa jauh penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan rasio antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin besar TPAK semakin baik karena menunjukkan lebih banyak penduduk yang masuk dalam angkatan kerja. Pada tahun 2017 tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Wakatobi sebesar 64,88 persen, artinya dari 100 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas terdapat 64 sampai 65 orang diantaranya termasuk dalam angkatan kerja atau sebanyak 64 sampai 65 orang aktif secara ekonomi. Apabila TPAK dibandingkan menurut jenis kelamin, TPAK perempuan jauh di bawah TPAK laki-laki, yaitu 53,09 persen untuk angkatan kerja perempuan dan 78,31 persen untuk angkatan kerja laki-laki.

Grafik 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

Tabel 4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD	73,75	49,18	58,55
SD/Paket A	86,57	57,33	71,46
SLTP/Paket B	56,36	41,10	48,24
SLTA/Paket C	88,25	48,92	70,72
Diploma keatas	95,41	89,30	92,28

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

Besar kecilnya TPAK dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain struktur umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, dll. Struktur umur mempengaruhi TPAK pada kelompok umur tertentu. Status perkawinan mempengaruhi TPAK wanita, karena wanita dihadapkan pada pilihan antara bekerja atau mengurus rumah tangga setelah terikat perkawinan. Faktor lain yang mempengaruhi TPAK adalah pendidikan. Tabel 4 menggambarkan distribusi TPAK terhadap tingkat pendidikan penduduk di Wakatobi. Terlihat kembali adanya perbedaan TPAK

yang cukup besar antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada sebagian besar tingkat pendidikan.

TPAK tertinggi ada pada tingkat pendidikan Diploma ke atas yaitu 95,41 persen untuk angkatan kerja laki-laki dan 89,30 persen untuk angkatan kerja perempuan. Sementara TPAK terendah pada tingkat pendidikan SLTP/Paket B yang berkisar 56,36 persen untuk laki-laki dan 41,10 persen untuk perempuan.

### 3.4 Penduduk Bekerja

Jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi yang bekerja tahun 2017 adalah 40.954 pekerja. Pada kurun waktu 2013 – 2017, penduduk bekerja di Wakatobi masih didominasi laki-laki walaupun marginnya tidak terlalu lebar. Pada tahun 2017 sekitar 55,72 persen penduduk bekerja adalah penduduk laki-laki, lebih besar dibandingkan persentase penduduk perempuan bekerja (44,28 persen).

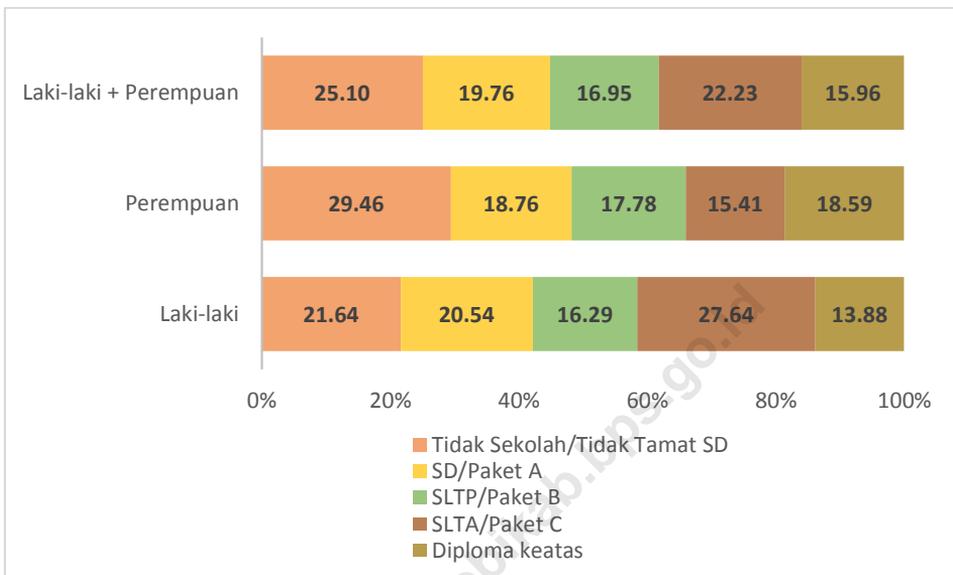
Untuk melihat keterlibatan penduduk suatu wilayah dalam dunia kerja, digunakan indikator rasio jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan rasio ini dapat diketahui kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja. Pada tahun 2017 rasio jumlah penduduk bekerja di Wakatobi mencapai 63,30 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 63 sampai 64 orang dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas telah bekerja. Rasio tertinggi penduduk bekerja berada pada kelompok umur 30 – 59 tahun. Bahkan jika dilihat lebih lanjut menurut jenis kelamin pada kelompok umur tersebut, maka rasio penduduk laki-laki yang bekerja mencapai lebih dari 90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh laki-laki pada kelompok umur 30 – 59 tahun telah bekerja. Hal tersebut berkaitan erat dengan kewajiban mencari nafkah bagi laki-laki dewasa baik untuk dirinya maupun keluarganya.

Tabel 5. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi, 2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
15 - 29	50,83	35,14	42,67
30 - 44	92,72	64,67	77,73
45 - 59	96,66	72,66	84,06
60+	65,04	37,60	49,40
Wakatobi	75,45	52,64	63,30

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

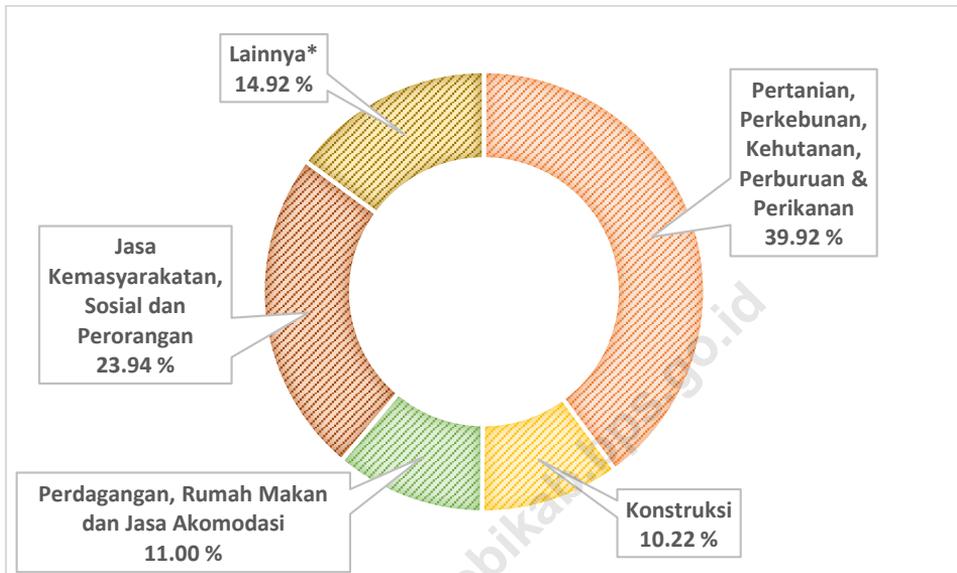
Grafik 3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

Jika ditinjau berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka lebih dari setengah (61,81 persen) penduduk Wakatobi yang bekerja tahun 2017 berijazah SLTP ke bawah. Hanya 15,96 persen yang berpendidikan diploma ke atas. Ditinjau lebih jauh berdasarkan jenis kelamin, pekerja laki-laki dengan tingkat pendidikan tidak sekolah/tidak tamat SD sebanyak 21,64 persen, tamat SD/paket A sebanyak 20,54 persen, tamat SLTP/paket B sebanyak 16,29 persen, tamat SLTA/paket C sebanyak 27,64 persen, dan tamat diploma keatas sebanyak 13,88 persen. Sedangkan pekerja perempuan dengan tingkat pendidikan tidak sekolah/tidak tamat SD sebanyak 29,46 persen, tamat SD/paket A sebanyak 18,76 persen, tamat SLTP/paket B sebanyak 17,78 persen, tamat SLTA/paket C sebanyak 15,41 persen, dan tamat diploma keatas sebanyak 18,59 persen. Oleh karena itu terlihat bahwa pada tingkat pendidikan SD dan SLTA lebih didominasi oleh pekerja laki-laki sedangkan pada pendidikan SD ke bawah, SLTP, dan diploma ke atas pekerja perempuan lebih mendominasi.

Grafik 4. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

*Keterangan : \*Lainnya termasuk Pertambangan & Penggalian; Industri; Listrik, Gas, dan Air Minum; Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi; Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, & Jasa Perusahaan*

Sementara komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama disajikan pada Grafik 5. Distribusi sektoral penyerapan menunjukkan bahwa 39,92 persen pekerja di Wakatobi memiliki lapangan usaha utama di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Pada sektor konstruksi hanya mampu menyerap sebanyak 10,22 persen tenaga kerja. Sementara sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi menyerap tenaga kerja sebesar 11,00 persen. Sebesar 23,94 persen terserap di sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan. Dari persentase sebesar 23,94 persen yang bekerja di sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan tersebut sejumlah 3.041 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi. Sedangkan sisanya sebesar 14,92 persen diserap oleh sektor lainnya

Tabel 6. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017

Lapangan Usaha Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	59,35	40,65	100,00
Konstruksi	100,00	0,00	100,00
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	36,16	63,84	100,00
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	51,53	48,47	100,00
Lainnya*	59,38	40,62	100,00
<b>Wakatobi</b>	<b>55,72</b>	<b>44,28</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

*Keterangan : \*Lainnya termasuk Pertambangan & Penggalian; Industri; Listrik, Gas, dan Air Minum; Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi; Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, & Jasa Perusahaan*

Jika ditinjau lebih jauh berdasarkan jenis kelamin, maka terlihat bahwa pekerja laki-laki lebih banyak dibandingkan pekerja perempuan pada sebagian besar kelompok lapangan usaha. Secara total, komposisi penduduk bekerja menurut sektor usaha dan jenis kelamin tidak memperlihatkan perbedaan yang mencolok, namun jika dilihat menurut lapangan usaha utama nampak perbedaan signifikan pada kelompok sektor konstruksi. Semua yang bekerja pada sektor tersebut adalah pekerja laki-laki. Hal ini dikarenakan sektor konstruksi didominasi sektor-sektor yang memiliki kecenderungan pengendalian kemampuan fisik selain kebutuhan keterampilan. Lain halnya dengan sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi. Pada sektor tersebut pekerja perempuan lah (63,84 persen) yang lebih mendominasi dibanding pekerja laki-laki (36,16 persen). Sedangkan pada pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan & perikanan jumlah pekerja laki-laki (59,35 persen) dan perempuan (40,65 persen) tidak memperlihatkan perbedaan yang terlalu besar. Hal tersebut juga berlaku pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan serta sektor lainnya.

Tabel 7. Penduduk bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	27,48	31,51	29,26
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	24,48	15,15	20,35
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3,65	0,96	2,46
Buruh/karyawan/pegawai	31,22	25,84	28,84
Pekerja bebas di non pertanian	8,33	1,37	5,25
Pekerja keluarga/tak dibayar	4,85	25,17	13,84
<b>Wakatobi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

Pembahasan selanjutnya yang perlu menjadi perhatian dalam ketenagakerjaan adalah status seseorang dalam pelaksanaan pekerjaan. Permasalahan ini bisa dijadikan sebagai pencirian awal bentuk kegiatan perekonomian di suatu wilayah yang sedang berlangsung. Hal mendasar keterlibatan seseorang dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai pengusaha (berusaha) atau sebagai pekerja (buruh). Secara umum BPS menggolongkan status seseorang dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan status pekerjaan. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha. Pekerja bersatus buruh/karyawan/pegawai dan pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar digolongkan ke dalam sektor formal, sedangkan yang berstatus selain itu umumnya digolongkan ke dalam sektor informal.

Hasil Sakernas Agustus 2017 memperlihatkan bahwa sebagian besar pekerja di Wakatobi berstatus berusaha sendiri (29,26 persen), artinya sebagian besar pekerja di Wakatobi bekerja dengan menanggung risiko secara ekonomis. Persentase terbanyak berikutnya adalah buruh/karyawan/pegawai (28,84 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (20,35 persen). Kemudian pekerja di Wakatobi yang berstatus pekerja keluarga/tak dibayar ada sebanyak 13,84 persen. Pekerja dengan status pekerja bebas di non pertanian hanya sebanyak 5,25 persen dan sisanya sebesar 2,46 persen adalah

pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh dibayar. Bagi pekerja dengan status berusaha dibantu pekerja keluarga, mereka bekerja dibantu pekerja tanpa membayar balas jasa pekerjaannya. Sementara bagi mereka yang berusaha sendiri, mereka menanggung risiko secara ekonomis untuk pekerjaannya.

Dengan demikian mayoritas pekerja di kabupaten Wakatobi berstatus sebagai pekerja informal (68,70 persen), sedangkan sisanya, yakni 31,30 persen yang berstatus pekerja formal. Hal ini di antaranya dikarenakan kelompok sektor pertanian yang menyerap sebagian besar penduduk bekerja di Wakatobi pada umumnya mempekerjakan tenaga keluarga sendiri atau bahkan diusahakan sendiri. Hal ini semakin dipertegas oleh persentase penduduk berdasarkan jenis pekerjaan yang menunjukkan bahwa sekitar 22,26 persen penduduk bekerja di Wakatobi memiliki jenis pekerjaan sebagai tenaga usaha pertanian dan peternakan. Jika ditinjau lebih jauh menurut jenis kelamin, maka terlihat bahwa pekerja perempuan (73,20 persen) lebih banyak berstatus sebagai pekerja informal dibanding pekerja laki-laki (65,13 persen) karena sebagian besar perempuan bekerja di Wakatobi berstatus sebagai pekerja keluarga.

Tabel 8. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017

Jenis Pekerjaan Utama	Persentase
(1)	(2)
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	36,88
Manajer	2,88
Profesional	5,19
Teknisi dan Asisten Profesional	2,75
Tenaga Tata Usaha	3,09
Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan	11,54
Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,26
Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan YBDI	8,80
Operator dan Perakit Mesin	2,25
Pekerja Kasar	4,35
<b>Wakatobi</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

Sementara untuk melihat optimalisasi para pekerja dalam lapangan usaha yang dilakukannya, digunakan indikator jumlah jam kerja keseluruhan. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017, persentase terbesar di Kabupaten Wakatobi adalah pekerja dengan jam kerja di atas jam kerja normal (35 jam) selama satu minggu yang lalu, yaitu sebesar 57,66 persen. Tingginya persentase penduduk dengan jam kerja lebih dari 35 jam ini disebabkan sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian yang menuntut jam kerja yang tinggi. Jumlah pekerja berkurang seiring dengan semakin rendahnya jumlah jam kerja seluruhnya selama seminggu. Pekerja dengan jam kerja selama 1 – 14 jam per pekan ada sebanyak 5,70 persen, pekerja dengan jam kerja selama 15 – 24 jam per pekan ada sebanyak 15,59 persen, pekerja dengan jam kerja selama 25 – 34 jam per pekan ada sebanyak 18,41 persen, sedangkan sisanya sebanyak 2,65 persen merupakan angkatan kerja yang sementara tidak bekerja saat pendataan dilaksanakan.

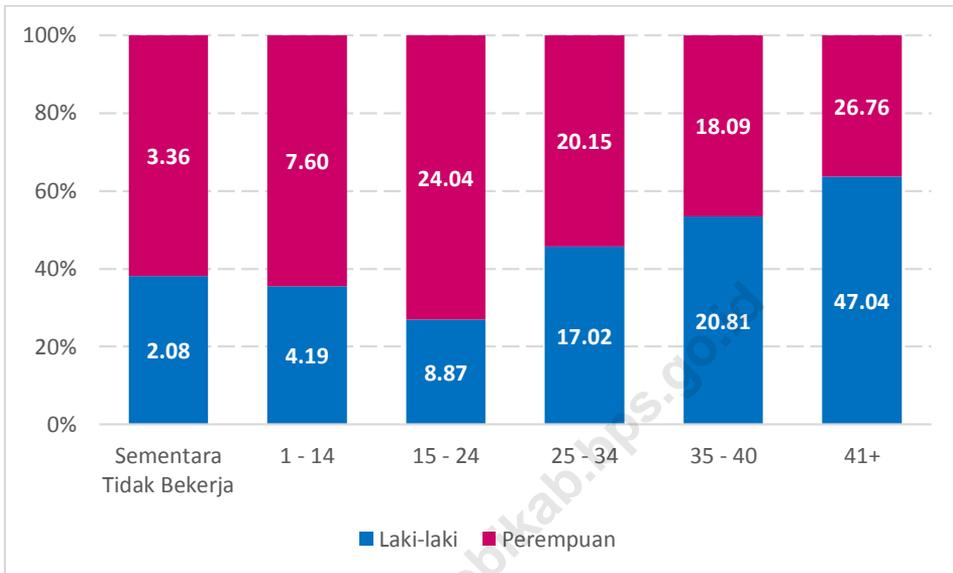
Tabel 9. Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017

Jumlah Jam Kerja	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sementara Tidak Bekerja	2,08	3,36	2,65
1 - 14	4,19	7,60	5,70
15 - 24	8,87	24,04	15,59
25 - 34	17,02	20,15	18,41
35 - 40	20,81	18,09	19,60
41+	47,04	26,76	38,06
<b>Wakatobi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin (Grafik 6), maka terlihat bahwa yang memiliki jam kerja di atas 35 jam sebagian besar adalah penduduk laki-laki. Sementara penduduk perempuan umumnya bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.

Grafik 5. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Jam Kerja Seminggu di Kabupaten Wakatobi, 2017



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

### 3.5 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja tentunya akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan tingkat kesempatan kerja yang ada. Kemudahan berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian merefleksikan kemudahan masyarakat mencari kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dirinya sekaligus berpartisipasi untuk mendapatkan imbalan berupa balas jasa atas faktor produksi dalam kegiatan ekonomi.

Tingkat kesempatan kerja (TKK) adalah ukuran yang menggambarkan persentase angkatan kerja yang bekerja atau angkatan kerja yang sudah terserap dalam aktifitas perekonomian. Indikator TKK juga menunjukkan kemudahan angkatan kerja untuk berpartisipasi secara ekonomi di seluruh sektor. Keadaan Agustus 2017, dari total angkatan kerja yang ada sekitar 97,57 persennya adalah penduduk yang bekerja. Ini mengindikasikan dari 100 orang yang tergolong angkatan kerja terdapat sekitar 97 sampai 98 orang telah bekerja atau terserap dalam pasar kerja yang tersebar di berbagai sektor perekonomian. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TKK antara angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja laki-laki tidak berbeda secara signifikan, dimana TKK laki-laki sekitar 93,36 persen dan TKK penduduk perempuan sekitar 99,14 persen.

Tabel 10. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017

Jenis Kelamin	TKK
(1)	(2)
Laki-laki	96,36
Perempuan	99,14
Wakatobi	97,57

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

### 3.6 Pengangguran

Salah satu isu penting dalam bidang ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Isu ini menjadi fokus perhatian selain kondisi perkembangan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan. Ditinjau dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan hasil dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Jumlah lapangan kerja yang tersedia memiliki keterbatasan secara jumlah dan kualifikasi bagi pencari kerja.

Pengangguran merupakan akibat dari peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah lapangan kerja. Lapangan kerja semakin sempit sehingga banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja. Faktor yang menyebabkan *excess supply* tenaga kerja ini antara lain tingkat investasi yang rendah sehingga perusahaan dalam negeri sulit mengembangkan dan meningkatkan usahanya, angkatan kerja yang sedang mencari kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia usaha, tidak ada kecocokan upah, dan tidak memiliki kemauan wirausaha.

Dalam bahasan ini yang termasuk penganggur adalah mereka yang tergolong dalam usia kerja yang pada saat pencacahan tidak bekerja, tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha, tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), serta tidak bekerja dan tidak menari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (*future starts*). Perbandingan jumlah pengangguran yang dimaksud terhadap jumlah penduduk angkatan kerja dikenal dengan istilah pengangguran terbuka (*open unemployment*).

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara total di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2017 adalah 2,43 persen, dengan TPT penduduk laki-laki sekitar 3,64 persen dan TPT penduduk perempuan sekitar 0,86 persen. Angka tingkat pengangguran terbuka ini belum mencerminkan ketersediaan lapangan

pekerjaan yang memadai karena angka tingkat pengangguran terbuka hanya mempehitungkan aspek pencari kerja saja. Sementara penduduk yang setengah menganggur (*under employment*), pengangguran tak kentara (*disguised unemployment*), dan pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*) tidak terlihat dari angka pengangguran terbuka.

Tabel 11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017

Kelompok Umur	TPT
(1)	(2)
15 - 34	5,47
35+	0,72
<b>Wakatobi</b>	<b>2,43</b>

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

Ditinjau menurut kelompok umur, TPT tampak tinggi pada kelompok usia muda (15 – 34 tahun), yakni mencapai kisaran 5,47 persen. Angka ini mengalami penurunan pada kelompok usia dewasa (35+ tahun) yakni sebanyak 0,72 persen. Hal ini lebih disebabkan pada usia dewasa tersebut (35+ tahun) umumnya penduduk telah memasuki jenjang perkawinan. Tanggung jawab secara ekonomi dalam rumah tangga menuntut seseorang untuk bekerja. Kondisi ini memaksa seseorang untuk tidak menjadi pengangguran terbuka.

Keberadaan pengangguran di kelompok usia produktif tentunya akan berdampak bagi proses pembangunan. Usia produktif seharusnya merupakan masa-masa potensial untuk berkreasi dan berkarya dengan optimal bagi masyarakat.

Tabel 12. Pengangguran Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017

Kelompok Umur	Pengangguran
(1)	(2)
15 - 34	80,98
35+	19,02
<b>Wakatobi</b>	<b>100,00</b>

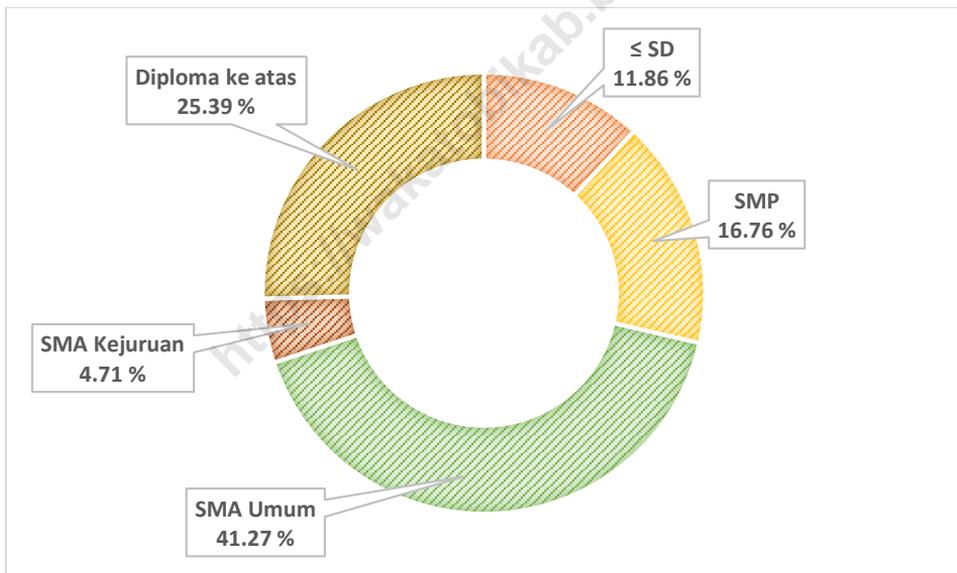
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

Jumlah pengangguran yang pada umumnya mengelompok pada usia muda (15 – 34 tahun) di antaranya disebabkan mereka masih baru menyelesaikan pendidikan dan masih menjadi anggota rumah tangga dari orang tuanya.

Distribusi jumlah pengangguran pada kelompok umur tersebut yaitu berkisar 80,98 persen.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pengangguran di Wakatobi didominasi oleh mereka yang berkuliah SLTA dan diploma ke atas. Rinciannya sekitar 41,27 persen penganggur berijazah SLTA dan 25,39 persen berijazah diploma ke atas, sedangkan sebanyak 16,76 persen merupakan penganggur dengan gelar SMP. Untuk pengangguran dengan jenjang pendidikan tertinggi SD ada sebanyak 11,86 persen, sedangkan sisanya sebesar 4,71 persen adalah penganggur dengan jenjang pendidikan tertingginya adalah SMA Kejuruan. Tingginya jumlah pengangguran yang berpendidikan tinggi tersebut merupakan fenomena yang harus ditanggapi serius oleh pemerintah.

Grafik 6. Jumlah Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

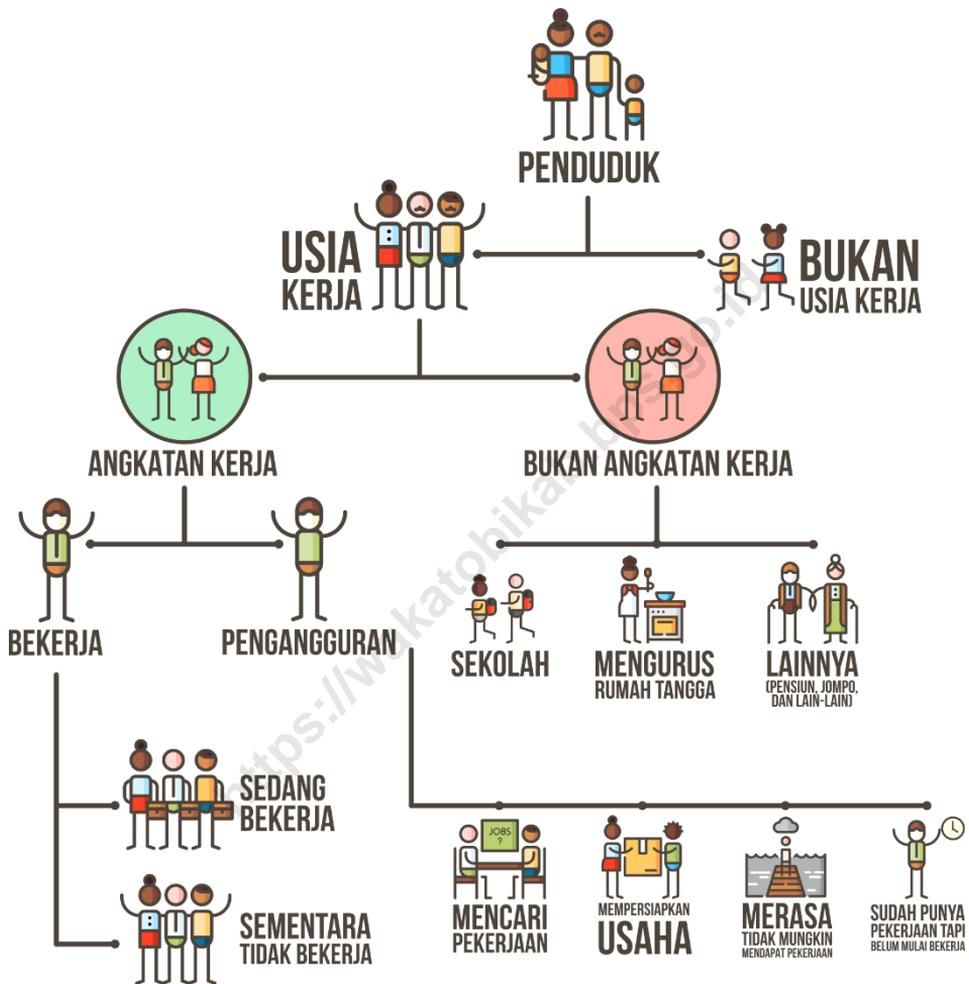
<https://wakatobikab.bps.go.id>

<https://www.katobikab.bps.go.id>

## Lampiran



Gambar 1. Diagram Ketenagakerjaan



Tabel 13. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin, 2017 (Jiwa)

Kegiatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>23.682</b>	<b>18.292</b>	<b>41.974</b>
Bekerja	22.819	18.135	40.954
Pengangguran	863	157	1.020
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>6.561</b>	<b>16.160</b>	<b>22.721</b>
Sekolah	2.847	3.525	6.372
Mengurus Rumah Tangga	2.914	11.936	14.850
Lainnya	800	699	1.499
<b>Total</b>	<b>30.243</b>	<b>34.452</b>	<b>64.695</b>

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

Tabel 14. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2017 (Jiwa)

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	9.110	6.239	15.349
Pertambangan dan Penggalian	277	182	459
Industri	866	2.095	2.961
Listrik, Gas, dan Air Minum	512	-	512
Konstruksi	2.332	-	2.332
Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	2.509	4.429	6.938
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1.407	-	1.407
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	343	52	395
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	5.463	5.138	10.601
<b>Total</b>	<b>22.819</b>	<b>18.135</b>	<b>18.135</b>

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

Tabel 15. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2017 (Jiwa)

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	6.270	5.715	11.985
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak	5.585	2.748	8.333
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	832	174	1.006
Buruh/karyawan/pegawai	7.125	4.686	11.811
Pekerja bebas di pertanian	-	-	-
Pekerja bebas di nonpertanian	1.901	248	2.149
Pekerja keluarga/tidak dibayar	1.106	4.564	5.670
<b>Total</b>	<b>22.819</b>	<b>18.135</b>	<b>40.954</b>

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

Tabel 16. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin, 2017 (Jiwa)

Jumlah Jam Kerja	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sementara Tidak Bekerja	474	610	1.084
1 - 14	956	1.378	2.334
15 - 24	2.023	4.360	6.383
25 - 34	3.884	3.654	7.538
35 - 40	4.748	3.280	8.028
41+	10.734	4.853	15.587
Total	22.819	18.135	40.954

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

Tabel 17. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2017 (Jiwa)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Bekerja</b>	<b>22.819</b>	<b>18.135</b>	<b>40.954</b>
≤ SD atau sederajat	9.626	8.745	18.371
SMP atau sederajat	3.718	3.224	6.942
SMA Umum	5.874	2.578	8.452
SMA Kejuruan	434	217	651
Diploma I/II/III	160	454	614
Universitas	3.007	2.917	5.924
<b>Pengangguran</b>	<b>863</b>	<b>157</b>	<b>1.020</b>
≤ SD atau sederajat	121	-	121
SMP atau sederajat	171	-	171
SMA Umum	264	157	421
SMA Kejuruan	48	-	48
Diploma I/II/III	-	-	-
Universitas	259	-	259
<b>Total</b>	<b>23.682</b>	<b>18.292</b>	<b>41.974</b>

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, diolah

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN WAKATOBI**

Jalan Utadae Samad No. 25, Kel. Mandati III,  
Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, 93795  
Telp: (0404)2222003  
Homepage: <http://wakatobikab.bps.go.id>  
Email: [bps7407@bps.go.id](mailto:bps7407@bps.go.id)